

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti mengangkat tema mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Bagaimana Kinerja PKH di desa sampali apakah sudah berjalan dengan baik atau buruk.melihat dari beberapa dari penelitan terdahulu masih buruknya kinerja implementasi PKH di beberapa wilayah.

Kemiskinan kini menjadi masalah global yang tak kunjung usai dan telah melanda semakin banyak penduduk dunia. Perhatian pada kemiskinan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan,pakaian,tempat berlindung dan air minum,hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran,keterbelakangan,dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan akan menghambat tercapainya

demokrasi,keadilan,dan persatuan. Oleh karena itu,pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebagian negara di dunia. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan, kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara,apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya segelintir orang saja.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini karena masalah kemiskinan terutama yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional,dimana berkaitan dengan aspek sosial,ekonomi,budaya,dan aspek lainnya. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang,sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera.

Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang sangat kompleks sehingga suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Secara umum,kemiskinan didefenisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila di bandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Mengingat tingginya angka jumlah penduduk miskin dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin dan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis.

Bagi para akademis, ahli statistic di BPS, dan pemerintah, “kemiskinan “ didefinisikan dan dianalisis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang defenisinya bervariasi. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia kerap kali mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Indonesia termasuk dari salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan di Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta .

Sumatera Utara berada di urutan ke 5 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Wilayah Sumatera pada Maret 2020. Dengan Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara yang berada di urutan ke 3 yang pada tahun 2020 jumlah penduduk miskinnya adalah 86,26 jiwa penduduk miskin . Dibandingkan dengan kabupaten dairi yang pada tahun 2020 hanya memiliki 22,93 jiwa penduduk miskin.

Selama beberapa decade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan prasarana dan

pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya aksesibilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa ; “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya . PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilakukan oleh kementerian sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Badan Pusat Statistik (BPS), PT.Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi

penanggulangan kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2008 Tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. No.02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia terkhususnya di pedesaan yang wilayahnya cenderung masih banyak tertinggal baik dari berbagai bidang, bidang teknologi, ekonomi dan pembangunan. Selain itu program ini juga dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan dalam hal harga dan kesediaan. Program ini di latarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. PKH adalah asistensi sosial kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu (kronis rentan terhadap guncangan) dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat PKH sebagai perlindungan sosial merupakan upaya mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan utama dari PKH adalah kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut senada dengan upaya percepatan target Millenium Development Goals (MDGs). Dimana secara khusus tujuan dari PKH adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, meningkatkan status kesehatan gizi ibu

hamil,meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan KSM. Selain itu tujuan lainnya adalah di bidang kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin,pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan). PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM),data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut,yaitu

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam satu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek,bibi,atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu,misalnya tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga . kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I,seperti Jamkesmas,BOS,Raskin dan BLT.

Hingga 2013, PKH telah menjangkau 2,4 Juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 334 Kabupaten /Kota dan 2.843 Kecamatan serta didukung oleh 11.132 tenaga pendamping di seluruh Indonesia. Dimasa pandemic ini targetnya bantuan tunai PKH menjangkau 10 Juta KPM dengan total anggaran Rp.28,71 Triliun . PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021 melalui Bank anggota Himbara :BNI, BRI, Bank Mandiri, serta BTN. Walaupun berjalan selama tujuh tahun, PKH Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan program ini masih perlu diperluas sehingga mampu mencakup sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia. Program ini memerlukan banyak efisiensi, harapan-harapan yang ada pun harus mempertimbangkan proses pelepasan dan transisi bagi penerima manfaat PKH, dan yang terakhir PKH perlu meningkatkan koordinasinya dengan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lainnya. Disamping tantangan-tantangan tersebut, PKH tetap menjadi program yang sangat penting bagi pengetasan kemiskinan di Indonesia. Bagaimana reformasi program yang efektif masih di teruskan secara menerus.

Kacamatan Percut Sei Tuan yang berada di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu Desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Desa Sampali terdiri dari 25 Dusun dengan luas wilayah 2.393 Ha dan jumlah penduduk 28.639 Jiwa. Jumlah penduduk miskin di Desa Sampali 879 Jiwa. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Sampali diharapkan mampu mengurangi kemiskinan

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin.

Program ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH terhadap dari *pertama*, pembayaran kepada RTSM yang tidak tepat waktu. Proses pencairan dana yang seharusnya dilakukan tepat waktu. Proses pencairan dana yang seharusnya dilakukan tepat waktu. Proses pencairan dana yang seharusnya dilakukan tepat waktu terkendala karena lambannya proses verifikasi. *Kedua*, kurangnya koordinasi antara instansi pendukung. Koordinasi yang terdiri dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, serta kementerian ketenagakerjaan belum terlaksana dengan baik akibatnya tidak semua anggota rumah tangga peserta PKH memperoleh jaminan kesehatan untuk orang miskin ataupun bantuan pendidikan untuk siswa miskin.

Berdasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melihat Bagaimana Implementasi PKH di Desa Sampali yang meliputi proses tahapan, faktor-faktor yang menjadi penghambat (permasalahan-permasalahan) hingga hasil kinerja serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampali?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Sampali
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

2.1.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan kepada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

2.1.2 Secara Praktis

Secara Praktis, bagi penulis berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap gejala dan permasalahan di lapangan. Dalam hal ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius mengamati jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta dapat dijadikan sebagai referensi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam setiap penelitian harus mempunyai kejelasan titik tolak yang menjadi landasan berpikir bagi proses penelitian dalam berbagai permasalahan yang diteliti. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengidentifikasi adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan *teori* sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi”. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori, berdasarkan rumusan di atas maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Anderson (1990:172) menyatakan bahwa memahami atau mentakrifkan implementasi kebijakan haruslah konteks yang luas :

Means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and technique work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals.

Sementara itu, Howlett & Ramesh (1995:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *,"The process whereby programs or policies are carried out; it denotes the translation of plans into practice."* Di mana definisi keduanya ini sejalan dengan tulisan Barret (2004:251) yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai *"translating policy into action"* atau kebijakan ke dalam tindakan. Sedangkan van Meter & van Horn (1975:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keberhasilan Implementasi

Banyak variabel yang mempengaruhi kinerja keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoritik beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keberhasilan implementasi kebijakan. George C. Edward III mengemukakan ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

Yaitu :

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber Daya;
- 3) Disposisi;
- 4) Struktur Organisasi;

Sementara itu Menurut Van Metter&Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
- 2) Sumber Daya;
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana;
- 4) Sikap atau Kecenderungann (*Disposition*) Para pelaksana

Sabatier menyebut, setelah interview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap member kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

- 1) Tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran;
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
 1. Dukungan para skateholder
 2. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah menurut Poerwadarminta (1976) kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar standar hidup minimum.

2.3.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk yaitu :

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut yaitu bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan cultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya di mana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

2.3.3 Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses diruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri-ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin (soeharto, 2009) yaitu :

- 1 Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- 2 Tidak mampu berusaha karena sakit,cacat fisik atau mental;
- 3 Tidak mampu berfungsi sosial;
- 4 Rendahnya sumber daya manusia;
- 5 Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
- 6 Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- 7 Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain)
- 8 Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat.

2.4 Program Keluarga Harapan(PKH)

2.4.1 Defenisi Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) . Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),yaitu pendidikan dan kesehatan . Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan,meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

2.4.2 Tujuan PKH

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus tujuan PKH adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (Balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/ Keluarga Sangat Miskin (KSM).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan ini sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu , namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu , baik tujuan, teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2

No	Nama	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Agnes Pradina	2019	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut	Pelaksanaan kegiatan PKH Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba ditemukan beberapa kendala antara lain	Persamaan: Metodologi atau jenis penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan

			<p>Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes</p>	<p>kurangnya komitmen dalam melaksanakan kewajiban bagi peserta Program Keluarga Harapan, Sumber data pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), kurangnya sosialisasi PKH dikalangan masyarakat, Penyaluran PKH melalui Bank Himbara, Peserta PKH maupun/mandiri yang tidak mau mengundurkan diri.</p>	<p>dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi. Sama-sama menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang mana George Edward III mengungkapkan ada 4 faktor-aktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Struktur Organisasi 4. Sikap para pelaksana. <p>Perbedaan: Terletak pada lokasi yang berbeda ditinjau penelitiannya, sudut pandang, dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Pradina adalah untuk mendeskripsikan karakteristik peserta PKH di Desa Kluwut Kecamatan Bulukumba Kabupaten Brebes dan untuk</p>
--	--	--	---	--	---

					mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran PKH Di Desa Kluwut Kecamatan Bulukumba Kabupaten Brebes dalam upaya penanggulangan kemiskinan. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berfokus untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi PKH di Desa Sampali dan mengetahui faktor-faktor yang yang mempengaruhi PKH tersebut.
2	Rahmania	2020	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi	Secara umum belum dapat dijelaskan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Teluk Rendah Ilir telah berjalan atau telah dilaksanakan namun dapat dikatakan belum maksimal karena masih	Persamaan : Metodologi atau jenis penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi. Perbedaan : Terletak pada lokasi yang berbeda ditiap penelitiannya,

				<p>terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam implementasinya program PKH Di Desa Teluk Rendah Ilir beum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH.</p>	<p>sudut pandang, dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi PKH, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi PKH dan solusi untuk mengatasi hambatan Implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berfokus untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi PKH di Desa Sampali dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKH tersebut. teori yang digunakan Rahmania adalah Teori David Easton yang berpendapat bahwa "kebijakan</p>
--	--	--	--	--	--

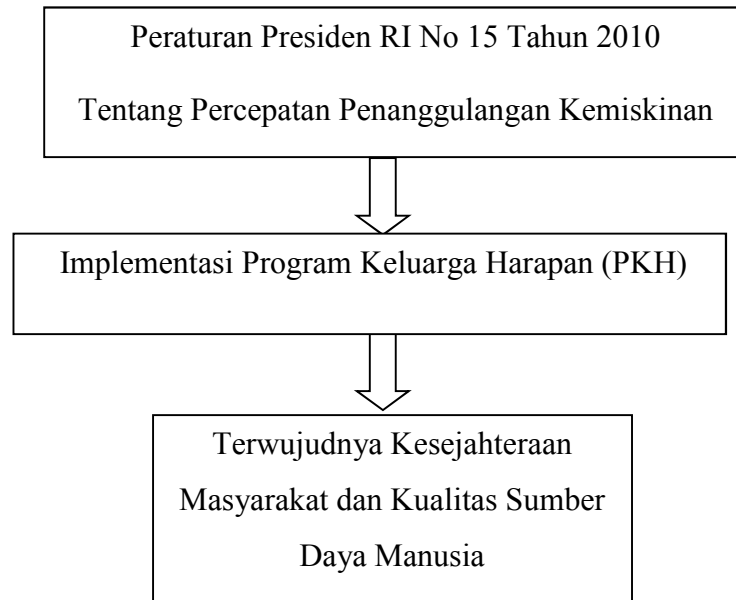
					dipandang sebagai suatu sistem maka kebijakan juga dipandang sebagai suatu proses.
3	Iven Nancy Manik	2019	Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir	Dari Hasil Penelitian Penulis di lapangan bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) Di Kecamatan Onan Runggu mendapat dukungan dari berbagai pihak kecamatan, desa, dan antusiasme masyarakat mengenai program ini cukup tinggi. Meski demikian, ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini terlihat dari sebagian kelompok sasaran yang masih belum tepat, jumlah	Persamaan: Metodologi atau jenis penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Iven Nancy Manik memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini yakni sama sama untuk mengetahui kinerja Implementasi PKH, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan tersebut. Perbedaan: Terletak pada lokasi yang berbeda di tiap penelitiannya, dan waktu dilakukannya

				pelaksana yang terbatas dari segi kuantitas sehingga belum bisa dikatakan maksimal.	penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Iven Nancy Manik memiliki cakupan yang lebih besar yakni Kecamatan. Teori yang dipakai Iven Nancy Manik adalah teori Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai <i>What Government do, why they do it, and what difference it makes.</i>
--	--	--	--	---	---

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas dapat dikemukakan defenisi konseptual dari masing-masing variabel , sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan Publik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan. Dalam praktiknya Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan
- b. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar standar hidup minimum.

- c. PKH Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian ada dua yaitu jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta

fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan melalui keterangan yang diperoleh dari responden, selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan peneliti yang telah dirumuskan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Peneliti memilih Desa Sampali sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena melihat masih rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data BPS tahun 2020 yang dimana Desa Sampali adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Deli Serdang sekaligus desa penerima bantuan PKH .

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, situasi sosial yang akan diamati secara mendalam oleh peneliti adalah pengamatan terhadap kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampali. Dalam penelitian untuk menentukan sampel/informan yang akan digunakan dalam penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci yaitu Pendamping PKH Desa Sampali dan Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Sampali
- b. Informan Utama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama yaitu masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sampali

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer, merupakan data tentang Implementasi Program Keluarga Harapan yang bersumber langsung dari informan atau sumber data yang berupa observasi, wawancara, dan kuisioner. Selain data primer adapun juga dikumpulkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, dan lain-lain yang memiliki relevansi terhadap focus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam Program Keluarga Harapan .

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam Wawancara Kualitatif peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan. mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka yang dirancang memunculkan pandangan dan opini dari partisipan

2. Dokumen-dokumen. selama proses penelitian. peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen, dokumen ini berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, *diary*, surat, e-mail).

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informan dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan men-scanning materi, mengetik data

lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generalsense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengambilan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraph).
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajari apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan

Gambar 3.1

Teknik Analisis Data

